

ABSTRAK

PERSPEKTIF KEBIJAKAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT PUBLIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

AZ ZAHRA SALSABILA

Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah masih tingginya angka tindak pidana korupsi di Indonesia, meskipun telah diberlakukan kebijakan kewajiban pelaporan harta kekayaan oleh pejabat publik melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketidakakuratan data LHKPN, hingga lemahnya sanksi hukum yang bersifat administratif, serta keterbatasan kewenangan KPK menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dengan praktik pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta diperkuat oleh penelitian empiris melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang hukum serta penegakan tindak pidana korupsi. Narasumber dalam penelitian ini meliputi dosen akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jaksa Fungsional pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, serta Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara sebagai wajib lapor. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan LHKPN memiliki peran penting sebagai instrumen preventif maupun represif dalam pemberantasan korupsi. Namun, efektivitas masih terhambat oleh lemahnya penegakan sanksi, keterbatasan kewenangan KPK, serta rendahnya akurasi laporan yang disampaikan pejabat publik. Meskipun tingkat kepatuhan pelaporan tinggi, kepatuhan tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa isi laporan disampaikan dengan jujur. Beberapa kasus korupsi besar justru dilakukan oleh pejabat yang sebelumnya patuh melaporkan kekayaannya. Kondisi ini menggambarkan bahwa sistem LHKPN perlu diperkuat secara menyeluruh, baik secara regulasi, maupun pengawasan.

Az Zahra Salsabila

Penelitian ini menyarankan kepada KPK, melalui sarana penal perlu dilakukan penguatan regulasi dengan pengaturan sanksi pidana yang tegas terhadap pejabat publik, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pejabat publik yang lalai dan tidak jujur dalam menyampaikan LHKPN. Sedangkan melalui sarana non-penal, perlu dilakukan peningkatan kewenangan KPK dalam proses verifikasi, pemeriksaan dan tindak lanjut laporan, serta optimalisasi peran masyarakat dan media sebagai pengawas eksternal. Penguatan sistem e-LHKPN juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, dan kemudahan akses publik. Dengan demikian, penyelenggaraan LHKPN diharapkan dapat berfungsi lebih optimal sebagai instrumen preventif sekaligus represif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci: LHKPN, Pejabat Publik, Pemberantasan Korupsi.

ABSTRACT

WEALTH REPORTING POLICY PERSPECTIVE PUBLIC OFFICIALS IN ERADICATION EFFORTS CORRUPTION

By

AZ ZAHRA SALSABILA

The main problem in this study is that the number of corruption crimes in Indonesia is still high, even though the policy of obligation to report assets has been implemented by public officials through the State Official's Asset Declaration Report (LHKPN). The reality on the ground shows that is the policy has not been running optimally. This can be seen from the inaccuracy of LHKPN data, to the weak administrative legal sanctions, and the limited authority of the KPK causing a gap between legal norms and implementation practices.

This study uses normative juridical research methods with legislative and conceptual approaches, and is strengthened by empirical research through interviews with parties who have competence and experience in the field of law enforcement of corruption crimes. The resource person in this study include academic lecturer from the Faculty of Law, University of Lampung, Functional Prosecutor in the field of Special Crimes of the Lampung High Prosecutor's Office, and the Chairman of the North Lampung Regency DPRD as mandatory reports. Primary data was obtained from interviews with these sources, while secondary data came from law and regulations, and literature.

The results of the study show that the LHKPN policy basically has an important role as a preventive and repressive instrument in the eradication of corruption. However, effectiveness is still hampered by weak sanctions enforcement, limited authority of the KPK, and low accuracy of reports submitted by public officials. Although reporting compliance is high, it does not always indicate that the content of the report is being submitted honestly. Some major corruption cases were actually carried out by officials who were previously complied with reporting their wealth. This condition illustrates that the LHKPN system needs to be strengthened comprehensively, both in terms of regulation and supervision.

Az Zahra Salsabila

This study suggests to the KPK, through penal means, it is necessary to strengthen regulations by regulating strict criminal sanctions against public officials, so that it can have a deterrent effect for public officials who are negligent and dishonest in submitting the LHKPN. Meanwhile, through non-penal means, it is necessary to increase the authority of the KPK in the process of verification, examination, and follow-up of reports, as well as optimizing the role of the public and the media as external supervisors. Strengthening the e-LHKPN system is also needed to improve transparency, data accuracy, and ease of public access. Thus, the implementation of LHKPN is expected to function more optimally as a preventive and repressive instrument in efforts to eradicate corruption in Indonesia.

Keywords: LHKPN, Public Officials, Corruption Eradication.